

LAPORAN KINERJA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
TAHUN ANGGARAN 2017



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, penyusunan laporan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Hukum Organisasi dan Humas, Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Bagian Humas ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Melalui laporan Kinerja Bagian Humas Tahun 2017 ini, dapat dilaporkan pencapaian sasaran dan program/kegiatan Bagian Humas yang mendukung pencapaian Penetapan Kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Humas tahun 2017. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Biro Hukum, Organisasi dan Humas, Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja serta pemicu peningkatan kinerja di Bagian Humas. Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Bagian Humas

Titin Resmiatin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi Bagian Humas.....	2
1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan SDM Bagian Humas	2
1.5 Anggaran	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	4
2.1 Rencana Strategis.....	4
2.2 Penetapan Kinerja Bagian Humas.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 Pencapaian Kinerja	8
3.2 Akuntabilitas Keuangan	13
BAB IV PENUTUP	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Laporan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Biro Hukum, Organisasi dan Humas (Biro HOH) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian yang tercantum di Rencana Strategis Biro HOH dan Rencana Strategis Kesekretariatan Utama (Settama) BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis BSN Tahun Anggaran 2015-2019.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2017, Bagian Humas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Biro HOH, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesekretariatan Utama dan mendukung kinerja BSN. Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat, maka pada tahun 2017 telah ditetapkan unsur indikator kinerja Bagian Humas sebagai berikut: 1)Jumlah pemberitaan SNI dan BSN 2).Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN. 3)Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga, 4)Jumlah Publikasi Kelembagaan dan 5) Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP

Capaian indikator kinerja Bagian Humas pada tahun 2016 adalah: 1)Jumlah pemberitaan SNI dan BSN sebanyak 3.065 berita, 2).Jumlah pameran yang diikuti BSN adalah 12 kali, 3).Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga sebanyak 25 kali, 4).Jumlah Publikasi Kelembagaan: 3 publikasi yaitu Laporan Tahunan 2016, Kalender dan Buku Profil dan 5).Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP sebanyak 100%

Untuk menjalankan kegiatan, maka Bagian Humas semula dialokasikan anggaran APBN 2017 sebesar Rp 4.500.000.000, namun ditengah tahun ada pemotongan anggaran dari pemerintah yang cukup signifikan, sehingga tersisa 3.351.292.000. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 2.958.711.671 (88,29%).

Hasil Capaian kinerja diatas, dapat lebih memotivasi Bagian Humas untuk tetap meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi terhadap kinerja Biro HOH, Kesekretariatan Utama, Badan Standardisasi Nasional secara Nasional yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan meningkatkan daya saing industri nasional.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan SDM Bagian Humas.....	2
Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian Bagian Humas Tahun 2015-2019	6
Tabel 3 Penetapan Kinerja Bagian Humas Tahun 2017	7
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Bagian Humas Tahun 2017	8
Tabel 5 Daftar Partisipasi BSN dalam Pameran	9
Tabel 6 Pagu dan Realisasi Angagran Bagian Humas TA 2016	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Bagian Humas.....	2
Gambar 2. Kegiatan Pameran di Batam yang diikuti oleh BSN.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Biro Hukum, Organisasi dan Humas (Biro HOH) adalah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya di bagian Humas. Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pada tahun 2018 mendatang dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan di bagian Humas

1.2 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 36, Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan.

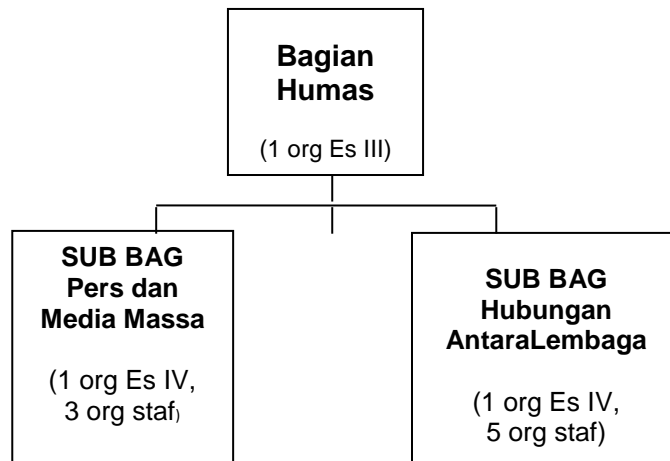
b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bagian Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.

1.3 Struktur Organisasi Bagian Humas

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2017 Bagian Hubungan Masyarakat memiliki personil sebanyak 11 orang, terdiri dari 1 orang Eselon III, 2 orang Eselon IV, 8 orang Staf dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Bagian Humas

1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia Bagian Humas

Tabel 1.
Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia Bagian Humas

No	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					Σ Total
		S3	S2	S1	S0	SMA	
1.	Eselon III	-	1	-	-	-	1
3.	Eselon IV		2		-		2
4.	Pranata Humas	-	-	1	3	-	4
5.	Staf	-	-	4	-	-	4
	Σ Total		3	5	3	-	11

Dari jumlah total 11 orang, pada bulan Agustus satu (1) orang staf humas di sub Bagian Hubungan Kelembagaan (Hublem) ditugaskan menjadi staf Kantor Layanan Teknis (KLT) Makassar. Pada akhir di bulan yang sama, tepatnya 28 Agustus 2017, masih di Sub Bagian Hublem, dua (2) orang staf mendapat beasiswa belajar S2 di USA. Sehingga sampai akhir tahun 2017, di Sub Bagian Hublem terdapat 1 Kepala Sub Bagian, dan 2 orang staf yang bisa efektif bekerja di kantor. Jumlah total di bagian Humas sampai akhir tahun 2017 adalah 8 orang, dari semula 11 orang.

1.5 Anggaran

Untuk menjalankan kegiatan, maka Bagian Humas semula dialokasikan anggaran APBN 2017 sebesar 4.500.000.000, namun ditengah tahun ada pemotongan anggaran dari pemerintah, sehingga tersisa 3.351.292.000. Dari Pagu 3.351.292.000 dapat direalisasikan sebesar : 2. 958.711.671 (88,29%)

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Humas tahun 2017 disusun dengan kerangka sebagai berikut:

a. Bab I. Pendahuluan.

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, komposisi dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia Bagian Humas, serta sistematika laporan.

b. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Bagian Humas 2017.

c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pencapaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Bagian Humas tahun 2017

d. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2015-2019, maka Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

Rencana Strategis Biro HOH BSN 2015 - 2019 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI

“Menyediakan SDM profesional, informasi aktual kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang implementatif”

MISI

1. Merencanakan dan mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan BSN secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan pelayanan prima dibidangi kepegawaian .
3. Memfasilitasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
4. Menyusun peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi;
5. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama stakeholder terhadap BSN;
7. Memperluas jaringan kemitraan yang mendukung pencitraan lembaga.

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

SASARAN

Pada tahun 2017 sasaran Biro HOH BSN adalah :

1. Terwujudnya good governance dan clean.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum.

3. Terlaksananya manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional
4. Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK.
6. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
7. Terinformasikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil – hasil BSN kepada masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional

PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

Kegiatan

Untuk mendukung visi dan misi serta sasaran Biro Hukum, Organisasi dan Humas, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai satu kegiatan yaitu Paket Publikasi Kelembagaan Yang Berkualitas yang meliputi beberapa sub kegiatan:

1. Membuat berita standardisasi
 - a. Penyiapan dan pelaksanaan pemberitaan standardisasi
 - persiapan pemberitaan
 - monitoring pemberitaan kelembagaan BSN
 - penanganan media dan hot isu
 - liputan pemberitaan kegiatan BSN
 - b. Pengelolaan ULIP
2. Kampanye edukasi publik
 - a. Keikutsertaan dalam pameran
 - b. Bulan Mutu Nasional

3. Melaksanakan koordinasi kelembagaan, melalui:
 - a. Koordinasi internal
 - b. Koordinasi antar lembaga
 - c. Forum kehumasan
 - d. Pendampingan pimpinan

Bagian Hubungan Masyarakat mendukung kegiatan Biro HOH melalui sub kegiatan Membuat berita standardisasi, Kampanye edukasi publik dan Melaksanakan koordinasi kelembagaan. Target pencapaian Bagian Humas untuk mendukung sasaran Biro HOH, dengan indikator kinerja, dan target sampai tahun 2019 dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian Bagian Hubungan Masyarakat Tahun 2015 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa	1000	1100	1200	1300	1500
	Jumlah keikutsertaan pameran BSN	5	7	9	11	13
	Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga	19	19	19	19	19
	Jumlah dokumen laporan tahunan	1	1	1	1	1

2.2 Penetapan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan target kinerja 2017 Bagian Humas mengacu kepada penetapan kinerja Kepala Biro HOH 2017. Untuk itu penetapan kinerja Bagian Humas tertuang dalam tabel 3.

Tabel 3. Penetapan Kinerja Bagian Humas Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	1 Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.200 berita
		2 Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	7 Kali
		3 Jumlah koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	25 Kali
		4 Jumlah publikasi kelembagaan	3 Laporan
		5 Persentase pertanyaan publik tentang BSN yang direspon ULIP	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pencapaian Indikator Bagian Humas tahun 2016 seperti dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Bagian Humas Tahun 2017

No.	Unsur Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian terhadap target
1.	Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.200 berita	3.065 berita	255%
2	Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	7 Kali	12 Kali	171%
3.	Jumlah koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	25 Kali	25 Kali	100%
4	Jumlah publikasi kelembagaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
5	Persentase pertanyaan publik tentang BSN yang direspon ULIP	100%	100%	100%

Indikator 1

Jumlah pemberitaan BSN dan SNI

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pemberitaan BSN dan SNI dihitung dari jumlah kata BSN dan SNI yang tercantum di pemberitaan. Yang dimaksud dengan pemberitaan disini meliputi pemberitaan baik tercetak (koran, majalah, tabloid) maupun online (website BSN, media online). Semakin banyak jumlah kata BSN dan SNI dalam pemberitaan, diharapkan masyarakat akan semakin mengenal BSN dan mengetahui manfaat SNI dan kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN

Pada tahun 2017, capaian jumlah pemberitaan BSN dan SNI mencapai 3047 meningkat hampir 3 kali lipat dibanding dengan yang ditargetkan (1100). Pemberitaan SNI ternyata banyak disuarakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder lainnya. Dengan pemberitaan SNI yang begitu gencar, SNI tersosialisasi kepada masyarakat dan peran BSN semakin diperkukuh dengan artikel-artikel yang seringkali menyebut BSN. Meskipun masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam memberitakan peran BSN -misalnya BSN adalah lembaga sertifikasi, namun kecenderungan dari waktu ke waktu hingga akhir tahun 2017 salah penyebutan mulai berkurang.

Tantangan pemberitaan di akhir tahun 2017 adalah munculnya kesamaan nomenklatur singkatan BSN –Badan Siber dan Sandi Negara dengan BSN-Badan Standardisasi Nasional sehingga BSN harus lebih keras lagi mensosialisasikan singkatan BSN kepada wartawan. Tantangan lain pada pemberitaan BSN adalah berkurangnya dana liputan ke luar kota yang menyebabkan pemberitaan web BSN dan berita lokal di daerah, kurang optimal. Untuk itu pemberitaan kelembagaan BSN dan SNI di media massa baik tercetak maupun loka masih harus terus di tingkatkan.

Indikator 2

Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN

Capaian indikator kinerja jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN pada tahun 2017 mencapai 12 kali, dari 7 kali yang yang ditargetkan. Seperti pemberitaan, keberhasilan pelaksanaan pameran juga didukung oleh stakeholder sehingga BSN mendapatkan kesempatan berpameran secara gratis (biaya sewa pameran ditanggung stakeholder). Dukungan stakeholder juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN semakin gencar serta informasinya memencar ke berbagai tempat strategis seperti di Kawasan Batam, Jogja, Makassar. Sinergi dalam berpameran menunjukkan stakeholder mulai membutuhkan BSN untuk mensosialisasikan layanan BSN, informasi mengenai sertifikasi SNI, proses mendapatkan dokumen SNI/standar internasional, berbagai pelatihan standardisasi, dan sebagainya. Kehadiran BSN dalam pameran dinilai stakeholder dapat mendukung stakeholder lain di pameran, seperti pada pameran Teknologi Tepat Guna yang dianggap mendukung para Innovator dalam menghilir-

kan produk inovasinya, maupun Pameran Hari Konsumen Nasional 2017 yang dianggap mendukung para UKM dalam meraih SNI.

Tabel 5. Daftar Partisipasi BSN dalam Pameran

NO.	KEGIATAN PAMERAN	TEMPAT	TANGGAL
1	Pameran Rakernas Ristekdikti 2017	Graha Sabha Pramana, UGM Jogja	29-31 Januari
2	Pameran Produk Unggulan dan Peluang Investasi (Sektor Perdagangan, Prindustrian, Koperasi, UKM dan Pariwisata) Tahun 2017	Mega Mall Batam Center, Batam	24-27 Maret 2017
3	Pameran Peringatan Hari Konsumen Nasional 2017	Lapangan Parkir Gubernuran Semarang, Jawa Tengah	3 Mei 2017
4	Pameran Produk Unggulan,, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi	Malioboro Mall	4-7 Mei 2017
5	Pameran Himafest BINUS 2017	Universitas BINUS, Jakarta	15-19 Mei 2017
6.	RITECH EXPO ke 22	Makassar, Sulawesi Selatan	10 – 13 Agustus 2017
7.	Pameran Indotools, Indohardware & Indofastener	JIIExpo, Kemayoran, Jakarta	27 – 30 September 2017
8	Pameran Teknologi Tepat Guna	Sirkuit Panggona Kota Palu, Sulawesi Tengah	25 – 30 September 2017
9.	Pameran Indonesia Quality Expo 2017	Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan	24 – 26 Oktober 2017
10	Pameran Inovasi produk-produk Unggulan Pertanian Indonesia	Mega Mall Batam Center, Batam,	17-20 November 2017
11	Pameran Germas Sapa	TMII, Jakarta	23 November 2017
12	Pameran Indonesia Quality and Safety Forum	JW Mariot Hotel, Jakarta	29 November 2017



Gabar 2. Pameran di Batam

Indikator 3

Jumlah koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya

Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan dibidang standardisasi, dalam implementasinya memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder baik menyangkut teknis operasional maupun perumusan kebijakan. Sebagai bagian dari proses manajemen pemerintahan, koordinasi antar instansi/lembaga mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan lembaga. Koordinasi kelembagaan dan antar instansi/lembaga meliputi pertemuan dengan instansi/asosiasi lain, pertemuan dengan pemerintah daerah/kabupaten/kota, rapat dengar pendapat, partisipasi keikutsertaan dalam forum bakohumas, rapat – rapat koordinasi internal, rapat – rapat pimpinan, dan rapat-rapat teknis lainnya, serta promosi kelembagaan BSN.

Untuk koordinasi kelembagaan baik internal maupun dengan K/L dan pemerintah daerah melampaui target dikarenakan setelah UU No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan keberadaan BSN sudah mulai diketahui banyak pihak sehingga beberapa pemangku kepentingan datang untuk melakukan koordinasi dengan BSN. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan dari stakholder untuk beraudiensi dengan BSN, disamping Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, serta Rapat Pimpinan di internal BSN, sebagai ajang membahas dan memutuskan hal-hal yang strategis. Sampai akhir tahun 2017, telah tercapai target koordinasi kelembagaan yaitu berjumlah 25 kali koordinasi kelembagaan.

Indikator 4**Jumlah Publikasi Kelembagaan**

Tahun 2016 pencapaian jumlah publikasi kelembagaan sudah mencapai yang ditargetkan yaitu 3 laporan : Buku Laporan Tahunan, Buku Profil BSN dan Video Profil BSN

Bercermin dari hasil tahun 2017, untuk tahun 2017 akan dilakukan perbaikan kualitas baik dari segi konten, desain maupun waktu penyelesaian.

Indikator 5**Persentase pertanyaan publik tentang BSN yang direspon ULIP**

Untuk indikator 5 yaitu Persentase pertanyaan publik tentang BSN yang direspon ULIP, ditahun 2016 mencapai 100%, yaitu semua pertanyaan terkait ULIP telah drespon dan diselesaikan.

Tahun 2017 pencapaian sasaran Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat untuk kelima indikator kinerjanya keseluruhannya melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini yaitu diatas 100%., sehingga sampai dengan akhir tahun 2017 pencapaian dari kedua indikator kinerja diatas adalah sebesar 174,6% dari target penetapan 100%.

Pencapaian yang melampaui target 100% dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yang terbesar adalah keberhasilan Humas BSN dalam menjalankan *partnership strategic* dengan beberapa mitra stakeholder BSN, sehingga kegiatan pemberitaan, pameran, maupun hubungan antar lembaga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini sangat bermanfaat bagi pencapain kinerja Humas BSN di tengah kebijakan pemerintah pemotongan anggaran yang angkanya cukup signifikan berpengaruh bagi pelaksanaan program-program kehumasan.

Walapun dari kelima indikator diatas telah mencapai target dan melampaui, Biro HOH yang dalam hal ini Bagian Humas tidak puas diri dan akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2016 ini Bagian Humas BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Sebesar Rp. 3.351.292.000, dan realisasi anggaran Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2. 958.711.671,- atau sebesar 88,29%.

Tabel 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Humas TA. 2017

Dalam rupiah

No	Uraian	2016		
		Pagu	Realisasi	%
3	Bagian Humas	3.351.292.000.	2. 958.711.671	88,29%
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	3.351.292.000.		

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Humas 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian Bagian Humas Tahun 2017 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Humas Tahun 2017, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Humas sangat mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Biro HOH.

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Bagian Humas Biro HOH, Kesekretariatan Utama - Badan Standardisasi Nasional TA. Bagian Humas 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja TA. 2017 telah dapat dipenuhi oleh Bagian Humas.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.

Kiranya LAKIP Bagian Humas 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Biro Hukum, Organisasi dan Humas di masa mendatang.